

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN
KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI KEPALA KELUARGA
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN
KELUARGA**

SKRIPSI

Oleh:

Syahlia Miftakhul Jannah

NIM. C91215085



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahlia Miftakhul Jannah
NIM : C91215100
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan
Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun
2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan
sumber rujukan.

Surabaya, 16 September 2019
Saya yang menyatakan,



Syahlia Miftakhul Jannah
NIM. C91215085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga” yang ditulis oleh Syahlia Miftakhul Jannah NIM. C91215085 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 September 2019
Pembimbing,



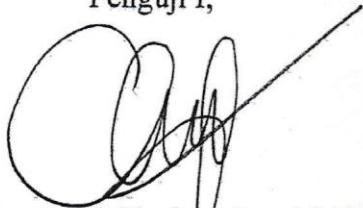
H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.
NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syahlia Miftakhul Jannah NIM. C91215085 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



H. Muhammad Ghufro, Lc., M.H.I.
NIP. 197602242001121003

Penguji II,



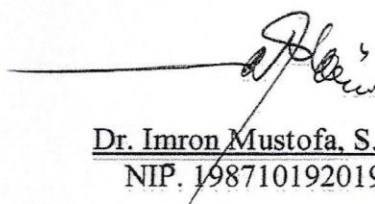
Dr. H. Makinuddin, S.H., M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji III,



Dr. Ita Musatrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 17 Oktober 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syahlia Miftakhul Jannah
NIM : C91215085
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Syahlia438@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI
SEBAGAI KEPALA KELUARGA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA
DEPOK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN
KETAHANAN KELUARGA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Oktober 2019

Penulis,

(Syahlia Miftakhul Jannah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kajian pustaka (*Library Research*) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga”. Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanaketentuan hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, dan (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017.

Data penelitian ini dihimpun dengan teknik dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan yaitu: (1) Menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap maka istri yang melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga, hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pengoptimalan potensi diri dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dalam sebuah keluarga. Hal tersebut dijalankan dengan tetap berpegang teguh pada kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai istri dari suami dan juga sebagai ibu rumah tangga pendidik anak-anaknya. Hal ini dilakukan semata-mata demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. (2) Adapun di dalam hukum Islam, tidak ada *nas* atau dalil-dalil yang secara khusus melarang istri untuk bekerja apalagi jika bekerjanya istri dikarenakan suatu keadaan tertentu yang menjadikan ia menggantikan tugas kepala keluarga sebagai pencari nafkah. Istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga memang tidak sesuai dengan kaidah dasar yang ada, karena mencari nafkah merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Namun hal ini tidak juga bertentangan dengan aturan Islam, terlebih hal ini mendatangkan kemanfaatan dan memelihara dari kemudharatan yang mana menjadi salah satu jalan mencapai tujuan pernikahan serta menghindarkan dari perceraian. Sehingga dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena mengandung *maslahah mursalah* di dalamnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran yang perlu dicantumkan yakni Diharapkan untuk lembaga pemerintah Kota Depok lebih intensif dalam melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga agar masyarakat mampu memahami dengan baik fungsi dan tujuan adanya peraturan daerah tersebut yang dapat membantu mengatasi dinamika sosial dalam kehidupan berumah tangga. Juga besar harapan penulis terhadap hak atas istri sebagai pelaksana tugas kepala keluarga agar betul-betul diperhatikan atas hak-haknya.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan merupakan istilah perkawinan dalam hukum Islam, yang berarti suatu akad yang sangat kuat atau *mi>tha>qa>n ghali>z}a>n* untuk mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya.¹ Dalam hal ini pernikahan bukan hanya sekedar kebutuhan biologis semata, namun pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sakral dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia. Dalam pandangan Islam, menjadikan kehidupan rumah tangga yang *saki>nah mawaddah warah}mah* merupakan tujuan dari suatu pernikahan.²

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Kata *saki>nah mawaddah warah}mah* menunjukkan keadaan keluarga yang damai dan tenteram dengan berlandaskan ikatan cinta dan kasih sayang. Pernikahan sendiri merupakan *sunnah* Allah kepada hamba-hamba-Nya, dengan pernikahan maka pasangan suami istri mampu mengurus kehidupan berumah

¹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

²Ibid., Pasal 3.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Apabila akad nikah telah dilangsungkan sesuai syarat dan rukunnya serta sah di mata hukum maka akan menimbulkan akibat hukum keperdataan bagi keduanya, yang mana timbul berbagai hak dan kewajiban dalam membangun sebuah rumah tangga antara suami dan istri. Dengan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka diharapkan pasangan suami istri akan saling mengerti betapa pentingnya memenuhi hak dan kewajiban, sehingga keadilan pun tetap terjaga dan tidak ada kezaliman diantaranya.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga”. Hal ini menunjukkan bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga tanpa menghilangkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajibannya dengan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga serta pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Melihat pembahasan di atas, pada sebuah peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga yang salah satunya mengatur mengenai hak dan kewajiban istri sebagai

⁵ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 63.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 ini juga mencantumkan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga yang mana dalam peraturannya disamping istri berkewajiban memberi nafkah, istri juga harus mendidik dan memelihara anak, serta mengatur dan mengurus rumah tangga.

⁶Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, Pasal 11 Ayat (2).
⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 165.
⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), vol. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 110.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), vol. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 110.

haruslah saling menghargai dan menghormati, juga mendukung dan tolong-menolong satu sama lain dalam kebajikan. Seperti halnya pada posisi ketika suami tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, tentunya istri mengambil alih hal tersebut agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 pasal 11 ayat (2) yang menjelaskan apabila suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap, maka istri berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga berjalan optimal guna mendapatkan kehidupan sejahtera dan harmonis.

Namun demikian, penulis tidak dapat memungkiri bahwasanya tugas yang harus dilaksanakan oleh istri menjadi 2 (dua) kali lipat, di samping harus menjadi pencari nafkah dalam keluarganya pun harus mengurus anak dan rumah tangga. Sehingga dalam hal ini bisa jadi seorang istri kewalahan menjalankan keduanya atau tidak maksimal pada salah satu tugas yang harus dilaksanakannya. Hal ini menjadikan adanya dua perspektif, yang mana di satu sisi terdapat kemaslahatan di dalamnya namun di sisi lain juga dapat dikatakan timbul sebuah ketimpangan fungsi peran dalam keluarga.

Penjelasan di atas menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam sebuah penelitian. Sebab terdapat permasalahan yang mana aturan yang tercantum dalam pasal 11 mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tidak diatur dalam hukum

Masalah

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

uraian latar belakang masalah di
si permasalahan yang terkandung di dalam

1. *Mas{lah{ah Mursalah;*
2. Tujuan perkawinan;
3. Hak dan kewajiban suami Istri dalam keluarga;
4. Kewajiban suami dalam keluarga;
5. Kewajiban istri dalam keluarga;

- Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka disusunlah batasan masalah agar penelitian bisa fokus dan sistematis. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga?

Penelitian dengan tema perkawinan dan pemenuhan kewajiban sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, banyak kajian tentang hak dan kewajiban suami maupun istri dalam suatu keluarga, namun terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan penulis kaji yakni mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga, dikatakan berbeda karena pada umumnya diketahui bahwa istri adalah sebagai ibu rumah tangga sedangkan suami sebagai kepala keluarga yang mana seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga baik dari segi nafkah maupun menjadi pemimpin dalam keluarganya.

Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan hak dan kewajiban suami maupun istri dalam suatu keluarga adalah sebagai berikut:

- [illegible]

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini lebih menekankan pada hukum boleh atau tidaknya seorang istri mengikut sertakan dirinya dalam mencari nafkah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang istri yang mencari nafkah untuk keluarga.

3. Skripsi tahun 2016 IAIN Surakarta, karya Saifu Robby El Baqy, yang berjudul, “*Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)*” bahwa penelitian yang dilakukan di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali difokuskan pada enam keluarga yang pencari nafkah utamanya adalah istri, dari penelitian tersebut pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga diberikan oleh istri sebagai pencari nafkah utama. Pengaruh positif istri sebagai pencari nafkah utama yaitu menjadikan perekonomian rumah tangga

¹⁰Hasan As'ari, "Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012).

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini menganalisa pengaruh terhadap kehidupan rumahtangga dalam perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang istri yang mencari nafkah untuk keluarga.

4. Skripsi tahun 2017 UIN Alauddin Makassar, karya Taufik Hidayat Sahkar, yang berjudul, “*Kedudukan Istri sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga di Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto)*” bahwa kedudukan istri sebagai penopang nafkah keluarga dalam budaya lokal suku Makassar di Desa Gantarang yang meliputi tentang faktor pendorong istri bekerja mencari nafkah utama, pengaruhnya dalam pembinaan anak, peranan istri dalam memenuhi nafkah keluarganya, pandangan masyarakat terkait kedudukan istri sebagai penopang nafkah keluarga pada dasarnya boleh-boleh saja asal sesuai dengan tuntunan agama, dan ada kesepakatan antara suami dan istri serta tidak melalaikan tugasnya sebagai istri.

¹¹Saifu Robby El Baqy, “Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)” (Skripsi--IAIN Surakarta, Surakarta, 2016).

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian ini lebih difokuskan pada praktek kehidupan berkeluarga dalam budaya lokal suku Makassar, di mana istri turut memiliki peranan dalam hal memenuhi nafkah keluarga seperti halnya sebagian istri yang ada di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah sama-sama bertujuan untuk terciptanya keluarga yang harmonis.

5. Skripsi tahun 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya, karya Mohamad Nur Samsudin, yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”* bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani sama sekali tidak terganggu dalam arti lainnya, apalagi hal itu didasari atas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut disamping menimbulkan dampak positif berupa peningkatan perekonomian, namun juga menimbulkan dampak negatif, yakni peran istri dalam mengurus rumah tangga menjadi

¹² Taufik Hidayat Sahkar, “Kedudukan Istri sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga di Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto)” (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017).

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Persamaannya terletak pada peningkatan kualitas kondisi keluarga sehingga tercapainya kehidupan yang harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, sedangkan perbedaan pada penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga yang dilengkapi dengan teori *maslahah mursalah* untuk melihat kemaslahatan yang ditimbulkan dari adanya peraturan daerah tersebut.

[illegible]

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, setidaknya mencakup dua hal:

1. Teoritis (keilmuan), yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan menambah wawasan pemikiran di bidang hukum perkawinan, khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.
2. Praktis (terapan), yaitu dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat kota Depok untuk mengatasi permasalahan dinamika sosial dalam keluarga dan bisa menjadi contoh bagi wilayah lain untuk mengatasi persoalan ketahanan keluarga.

[illegible]

1. Hukum Islam: Seperangkat peraturan berdasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud adalah ketentuan yang berkenaan dengan al-Qur'an, al-Hadits maupun kitab-kitab *fiqh* mengenai peningkatan ketahanan keluarga, yang mana berfokus pada hak dan kewajiban istri dalam keluarga dengan menggunakan teori *mas'lahah mursalah*.

2. Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga: Sesuatu yang harus diterima dan harus dilaksanakan oleh istri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga dalam rumah tangga.

[illegible]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

[illegible]

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang mana akan menjadi pedoman dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁶ Dengan demikian, data primer merupakan data utama dalam penelitian ini, yakni Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, yang berfokus pada paragraf 3 mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga.

Data sekunder adalah data yang berupa analisis yang mengambil sumber primer sebagai objek pembahasannya.¹⁷ Data sekunder juga dapat berupa hasil penelitian orang lain yang sudah menjadi karya ilmiah. Sumber data yang menunjang terselesaikannya penelitian ini antara lain; al-Qur'an, al-Hadits, *us}hu>lfiqh*, kaidah-kaidah *fiqh*, pendapat para ulama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, karangan Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh* Munakahat, karangan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

- b. *Organizing*, merupakan kegiatan mengatur dan menyusun data sehingga dapat menghasilkan rumusan deskriptif yang valid.¹⁹ Penyusunan data pada penelitian ini berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
- c. *Analizing*, merupakan kegiatan melakukan analisis deskriptif, yaitu metode dalam meneliti suatu objek, kondisi atau pemikiran yang bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang diinterpretasikan secara tepat.²⁰ Analisis terhadap data pada penelitian ini berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dengan menganalisis hukum Islam menggunakan *mas{lah{ah mursalah*, sehingga memperoleh kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang dibuat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan penulis dalam menganalisa data dan materi, antara lain:

- a. Deskriptif-Kualitatif

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan, dilakukan analisis secara deskriptif-kualitatif yakni mengeksplorasi data yang ada dengan

¹⁹Ibid., 51.

²⁰ Ibid.

Pada metode ini penulis berusaha mengerucutkan pokok pembahasan dengan diawali pembahasan yang umum terlebih dahulu kemudian mengerucut pada pembahasan yang lebih khusus. Peneliti mendeskripsikan gambaran umum dan latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, kemudian menjelaskan salah satu paragraf yang membahas mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga, setelah itu menjelaskan kemaslahatan yang ditimbulkan dengan diaturnya hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Adanya sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

[illegible]

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan tentang *masalah* *mursalah*, tujuan perkawinan, serta hak dan kewajiban bersama antara suami istri, kemudian juga membahas kewajiban suami terhadap istri dalam berumah tangga menurut hukum Islam, begitu juga sebaliknya.

Bab ketiga, berisi penjelasan deskripsi terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga terkait hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga, yang meliputi gambaran umum dan juga latar belakang adanya peraturan daerah tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis pasal yang mengatur hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 dan juga analisis hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga terkait hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dengan menggunakan teori *masalah* *mursalah* yang didahului dengan penjelasan hukum *fiqhnya*.

Bab kelima, merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

1. *Al-Mas{lah} al-Mu'tabar*, yaitu *mas{lah}* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qis{a>s}* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamr* untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

3. *Al-Maslahah al-Mursalah*, dan maslahat semacam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang

[illegible]

Dengan demikian, *mas{lah}ah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil pengakuan tetapi juga tidak ada dalil pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *'ilat* yangkeluadarisha>ra' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *sha>ra'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *mas{lah}{ah mursalah*. Tujuan utama *mas{lah}{ahmursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.⁶

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *mas{lah{ah mursalah* ialah *h}ujjah* syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum berkenaan dengan kejadian atau masalah yang tidak ada hukumnya didalam *nas* dan *ijma* atau *qiya*s atau *istih*sa.⁷ Para Ulama yang menjadikan *h}ujjah**mas{lah{ah mursalah* sangat berhati-hati agar tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut

⁷ Miftahul Arifin dan A. Faishol Haq, *Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*(Surabaya: Citra Media, 1997), 144.

1. Kemaslahatan harus bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Maksudnya adalah maslahat tersebut dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab, syariat dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga semata.
2. Kemaslahatan tersebut sejalan dengan *maqasid al-shari'ah* dan tidak bertentangan dengan *nas* atau dalil-dalil *qat'i*. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan *shari'*. Sehingga atas dasar ini, tidak sah mengakui *maslahah* yang menuntut adanya kesamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal waris, karena kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan *nas* dan dalil-dalil *qat'i*.
3. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi banyak orang, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu. Mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi seluruh umat manusia, maka penetapan hukum atas dasar maslahat bagi kalangan tertentu ialah tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi seluruh umat manusia.

⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 92.

B. Tujuan Perkawinan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

Kompilasi Hukum Islam pun mencantumkan hal serupa, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹⁰ Sehingga *sakinah mawaddah warahmah* dapat diartikan sebagai kondisi keluarga yang damai dan tenteram dengan dilandasi oleh ikatan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang damai dan tenteram akan terwujud

[illegible]

Sehubungan dengan itu, perkawinan juga memiliki tujuan sebagai berikut:

- Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini ialah dengan akad nikah. Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki naluri seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan perkawinan yang sah, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 223.

"نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ"

¹¹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 172.

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 15.

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ." (راوه ابن مسعود)

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian, ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan harus diperlihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan dapat terealisasi.¹⁸

¹⁶ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (‘Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi, 2017), 318.

¹⁸ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (Juni, 2018), 78.

Hal ini pun diperjelas dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda:²⁴

"فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُنَّ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْبِرْهُنَّ صَبْرًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (رواه مسلم)

Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.

Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi dua bagian, antara lain kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang tidak bersifat materi. Berikut merupakan kewajiban yang bersifat materi, antara lain:

1. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²⁵ Definisi lain menyatakan bahwa mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi

²⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-4, Ed. ke-1, 84.

²⁵Ibid.

istrinya.²⁶ Mengenai mahar, itu adalah hak khusus perempuan berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيمًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Adapun disyariatkannya mahar adalah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. *Fuqaha*>’ sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas, ukuran tersebut diserahkan kepada kemampuan suami. Tidak ada dalil *sha>ra*’ yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Sekalipun *fuqaha*>’ sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, namun seyogianya tidak berlebihan.²⁷

2. Nafkah merupakan bentuk kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang (suami bergaul dengan istrinya).²⁸ Karena pernikahan menjadi salah satu sebab wajibnya nafkah, para *fukah>* pun sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik *muslimah* maupun kafir jika memang dinikahi dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika pernikahannya *fasid* atau batal maka suami berhak

²⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), ed. Revisi, 285.

²⁷Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 179.

²⁸Ibid., 212.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Adapun disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam berumah tangga. Maka yang demikian akan dapat berjalan secara baik apabila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.³⁰

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya dengan beberapa syarat, berikut merupakan syarat-syarat wajibnya nafkah menurut mayoritas ulama:³¹

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya

Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami.

2. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), vol. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 110.

³⁰Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 167.

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), vol. 10, 112.

Jika pernikahan tersebut *fasid* maka suami tidak memiliki kewajiban menafkahi istrinya karena akad yang *fasid* mewajibkannya berpisah dan istri tidak dianggap ditahan di sisi suami sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang *fasid*.

Pemberian nafkah dilakukan sesuai dengan kadar kondisi ekonomi suatu keluarga, sehingga pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya menurut kemampuan sang suami.³² Allah berfirman dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat

”أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِنَصِيِّكُمْ عَلَيْهِمْ”

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

"لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا"

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

[illegible]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri menjadi gugur apabila suami dalam keadaan miskin atau tidak mampu dalam memberi nafkah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah nafkah menjadi hutang dengan ketetapan hakim apabila suami tidak menunaikan kewajiban nafkah.³⁴ Pada dasarnya nafkah diwajibkan sebagai penunjang kehidupan berumah tangga, dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya atau *nushuz*. Maka menurut jumhur ulama, suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya.

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat 4.

3. Biaya pendidikan bagi anak.

Adapun kewajiban yang tidak bersifat materi, antara lain:³⁶

1. Berbuat baik kepada istri dan memperlakukannya dengan baik

Dalam hal ini, termasuk suami berkewajiban untuk memberikan hak istri dengan hati rida, bertutur kata lembut, menghargai segala usaha baik yang telah dilakukannya, menjaga kesucian istri dan menggaulinya dengan baik, tidak juga menyutubuhinya di bagian anus.

2. Menjaga dan melindungi istrinya

Suami wajib menjaga istrinya, memelihara istrinya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, dan menjauhkan istri dari pembicaraan yang tidak baik.

3. Menuntun istri pada jalan kebaikan

Sudah menjadi tugas suami untuk menuntun istrinya ke jalan yang baik dengan mengingatkan dan mencontohkan hal baik pada istri apabila istri keliru dalam melaksanakan tugasnya.

4. Mengajari dan mendidik istrinya tentang apa yang dibutuhkan dalam konteks kehidupan agama

Mengajari dan mendidik istri mengenai hukum Islam, mulai dari hukum *ṭahārah*, haid, sholat-sholat yang wajib *ḍaʿa*’ maupun yang tidak wajib *ḍaʿa*’, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat Thaha ayat 132.

³⁶Syafa'at, *Hukum Keluarga*, 214.

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat telah mengeluarkan aturan terkait dengan ketahanan keluarga melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Adapun pembentukan peraturan daerah ini berdasarkan pada beberapa hal yang termuat dalam konsiderans sebagai berikut:¹

- ¹Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

- Adapun pelaksanaan peningkatan ketahanan keluarga dilakukan sesuai asas-

1. Keagamaan;
2. Legalitas;
3. Kemanusiaan;
4. Keseimbangan;
5. Manfaat;
6. Perlindungan;

[illegible]

7. Kekeluargaan;
8. Keterpaduan;
9. Partisipatif.

Adapun yang dimaksud dengan “keagamaan” adalah bahwa pelaksanaan peningkatan ketahanan keluarga harus dilandasi dengan nilai-nilai agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan “legalitas” adalah bahwa peningkatan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah bahwa pelaksanaan peningkatan ketahanan keluarga harus dilandasi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu dengan masyarakat, antara fisik dengan mental, serta antara material dengan spiritual.

Adapun yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa pelaksanaan, peningkatan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi setiap warga Negara, dan maksud dari “perlindungan” adalah bahwa pelaksanaan peningkatan ketahanan keluarga harus melindungi masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Adapun yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga harus dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan

Adapun pelaksanaan peningkatan ketahanan keluarga dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang termuat dalam Pasal 3 sebagai berikut:³

- Adapun tujuan dari dibentuknya peraturan daerah ini termuat dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- ³ Ibid.

- c. Menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan per-
bagi sumber daya manusia;
 - d. Menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan
keberhasilan pembangunan;
 - e. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang
 - f. Meningkatkan peran serta keluarga dalam per-
pembangunan.
- Adapun ruang lingkup peningkatan ketahanan keluarga Kota
m Pasal 5 sebagai berikut:⁴
- Penyelenggaraan pendampingan pra-nikah;

- c. Menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan per-
bagi sumber daya manusia;
- d. Menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan
keberhasilan pembangunan;
- e. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang
- f. Meningkatkan peran serta keluarga dalam per-
pembangunan.

Adapun ruang lingkup peningkatan ketahanan keluarga Kota
m Pasal 5 sebagai berikut:⁴

Penyelenggaraan pendampingan pra-nikah;

- c. Menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan per-
bagi sumber daya manusia;
 - d. Menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan
keberhasilan pembangunan;
 - e. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang
 - f. Meningkatkan peran serta keluarga dalam per-
pembangunan.
- Adapun ruang lingkup peningkatan ketahanan keluarga Kota
m Pasal 5 sebagai berikut:⁴
- Penyelenggaraan pendampingan pra-nikah;

- c. Menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan per-
bagi sumber daya manusia;
- d. Menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan
keberhasilan pembangunan;
- e. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang
- f. Meningkatkan peran serta keluarga dalam per-
pembangunan.

Adapun ruang lingkup peningkatan ketahanan keluarga Kota
m Pasal 5 sebagai berikut:⁴

Penyelenggaraan pendampingan pra-nikah;

B. Latar Belakang Pembuatan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga mendefinisikan, “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”. Menurut Soerjono Soekanto, “Keluarga merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang berkelompok karena kebutuhan pokok yang sama yaitu kebutuhan kehidupan kekerabatan”.⁵ Keluarga sejahtera merupakan pondasidasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan bercerai-berai mendorong lemahnya pondasi kehidupan masyarakat bernegara.⁶

Lingkungan sosial yang paling dekat dengan manusia adalah keluarga. Keluarga adalah inti sari pertama yang memberikan pengaruh terhadap sosialisasi diri manusia terhadap pembentukan pribadi manusia. Jadi peran keluarga sangat penting untuk perkembangan seseorang. Untuk membentuk pribadi yang baik maka diperlukan kondisi ketahanan keluarga yang baik pula.

Peraturan daerah ini juga mendefinisikan “Ketahanan keluarga adalah keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiel dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”.

⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. 5 (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 57.

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* 2016, 1.

Pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial ekonomi, budaya

Dalam konsiderans disebutkan uraian singkat mengenai pokok pikiran yang

menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan daerah tersebut. Pokok

[illegible]

1. Unsur filosofis

Keluarga sebagai sumber daya pembangunan dalam peningkatan ketahanan keluarga yang bisa menumbuhkan nilai-nilai falsafah bangsa yang berpedoman pada Pancasila dan pembukaan UUD RI Tahun 1945. Dengan terbangunnya ketahanan keluarga maka akan mampu melahirkan ketahanan bangsa. Sebab keluarga sejahtera merupakan pondasi dasar bagi keutuhan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan bercerai-berai mendorong lemahnya pondasi kehidupan masyarakat bernegara.

Landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga berupa pertimbangan bahwa peraturan daerah yang dibentuk bertujuan untuk hidup harmonis

[illegible]

Sehubungan dengan itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, ada delapan fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.⁹ Dengan adanya fungsi-fungsi yang dimiliki oleh keluarga diharapkan dapat membantu untuk menghadapi masalah dinamika sosial yang ada, karena ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga itu sendiri untuk memanfaatkan potensinya agar dapat menghadapi tantangan hidup termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis. Sehingga dari hal tersebut dapat mencapai apa yang menjadi tujuan utama adanya peraturan daerah terkait peningkatan ketahanan keluarga di Kota Depok.

[illegible]

Secara yuridis terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait keluarga diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

A. Hak dan Kewajiban Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga

Adapun yang telah dijelaskan sebelumnya terkait latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, salah satu isi pembahasan dalam peraturan daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga yang termuat dalam pasal 11, sebagai berikut:¹

1. Istri sebagai Kepala Keluarga apabila:

- ¹Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, Pasal 11.

Pasal 11 ayat (1) menjelaskan mengenai istri dikatakan sebagai kepala keluarga apabila suami telah meninggal dunia suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi “Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami dan istri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan” atau pun pasangan suami istri telah bercerai.

Pasal 11 ayat (2), dalam hal ini istri berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dikarenakan mengalami kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap.

Pasal 11 ayat (3) menjelaskan bahwa keluarga yang tidak ada ayah, hanya terdiri dari ibu dan anak saja maka seorang ibu juga harus berperan sebagai ayah yang mana selain berkewajiban mengurus rumah tangga namun juga berkewajiban menafkahi anaknya lahir dan batin.

- e. Menjadi pembimbing dan pemelihara ke
jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan
- f. Mengurus kartu keluarga dan dokumen h
- g. Membangun keluarga yang berkualitas s

yang telah ditinggal suaminya meninggal (suaminya) dan istri yang berperan sebagai pe yang menggantikan peran suami dikarenakan psikis yang tetap) memiliki hak-hak sebagai huruf di atas. Dalam hal ini, seorang istri mer dan perhatian dari Pemerintah Kota atas hak- kedudukan hak dan kewajiban yang sama di li juga di mata hukum, serta berhak menjadi pe

- a. Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- b. Menjaga kehormatan keluarga;
- c. Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan;
- d. Mengatur dan mengurus rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

Adapun dari penjelasan tersebut di atas, maka seorang istri berperan sebagai kepala keluarga dengan berbagai macam hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tersebut apabila suami istri telah bercerai, suami telah meninggal dunia, dan suami mengalami cacat fisik dan psikis yang tetap. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah bagi ibu dan anak maka seorang ibu memang memiliki kewajiban menafkahi anak-anaknya baik lahir maupun batin sebagai orang tua. Sama halnya jika suami masih hidup namun memiliki keterbatasan yang dapat ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam

Peraturan Perundang-undangan, maka disini peran istri begitu penting dalam menggantikan peran suami sebagai kepala keluarga agar kebutuhan hidup keluarga tetap terpenuhi, sehingga faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi ketahanan keluarga dapat teratasi dengan baik karena kecukupan penghasilan merupakan salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga.

Adanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga menunjukkan bahwa eksistensi sebagai kepala keluarga baik secara kebudayaan maupun sosial tidak harus suami yang menjalankan tugas sebagai kepala keluarga namun dapat digantikan oleh istri dengan suatu alasan tertentu, hal ini ditentukan pada kemampuan seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu melaksanakan tugas kepala keluarga agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Mengingat dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya pasangan suami istri harus saling menghargai dan menghormati, juga mendukung dan tolong-menolong satu sama lain dalam kebajikan, sehingga dengan terlaksananya hal tersebut mampu mengoptimalkan peranan keluarga yang mana menjadi suatu bentuk upaya mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga merupakan bentuk upaya dari Pemerintah Kota Depok guna meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin untuk membantu mewujudkan cita-cita Negara Indonesia yang tercantum dalam

Hukum Islam mengatur berbagai hal terkait dengan permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam hal ini, keluarga merupakan pokok pembahasan yang dikaji oleh penulis yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga, di mana istri berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga apabila suami istri telah bercerai, suami telah meninggal, dan suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap.

Adapun istri sebagai kepala keluarga dengan kondisi suami istri telah bercerai atau suami telah meninggal dunia menjadi wajar karena istri yang juga merupakan seorang ibu memiliki kewajiban terhadap anaknya dalam memenuhi

[illegible]

Adapun posisi istri sebagai kepala keluarga dengan masih adanya seorang suami adalah fenomena yang berada diluar dari kehidupan keluarga pada umumnya. Pasalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”³ yang mana dalam hal ini suami memiliki kewajiban sebagaimana mestinya seorang kepala keluarga dan istri memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut, para *fuqaha*⁴ pun sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang dinikahinya secara sah.⁴

Terkait hal ini, di mana kondisi suami cacat fisik dan psikis yang tetap, istri sebagai kepala keluarga tidak harus dijadikan permasalahan yang besar karena dalam konsep kemaslahatan sebuah keluarga dalam hukum Islam adalah untuk membangun keutuhan dalam unsur-unsur rumah tangga. Sehingga dalam hal ini, konteks istri sebagai kepala keluarga adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga dengan keadaan tertentu yang mengharuskan istri menjadi

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), vol. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 110.

pelaksana tugas kepala keluarga tanpa melanggar atau menentang konsep seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menyatakan bahwa kedudukan laki-laki berada satu tingkat diatas perempuan, namun dalam permasalahan ini keberadaan keluarga ketika laki-laki tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga maka disitulah dibutuhkan sosok perempuan yang memiliki potensi diri dengan berbagai macam hak dan kewajibannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga demi terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Mengingat perempuan yang bekerja mencari nafkah pasti akan berpengaruh juga terhadap pola kerja rumah tangganya, yang mana di satu sisi bekerja mencari nafkah tetapi juga menjadi peran penting dalam kegiatan rumah tangga. Sehingga sosok perempuan yang memiliki potensi diri melaksanakan kedua tugas tersebut agar rumah tangga tetap berjalan dengan baik sangat dibutuhkan.

Hal tersebut yang menjadikan sosok perempuan memiliki potensi sebagai pelaksana tugas kepala keluarga. Oleh karena itu, sangat ironis sebuah keluarga dipimpin oleh sosok laki-laki yang tidak mampu menjadikan keberadaan keluarga tersebut sejahtera lahir dan bahagia batin. Dalam aspek nilai budaya pun, di Indonesia sendiri memberikan ruang terhadap perempuan untuk mengolah dan

Terkait tujuan utama dari sebuah pernikahan, yang mana adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* di mana sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Dengan dilandasi ikatan cinta dan kasih sayang menjalani kehidupan berkeluarga tentunya pasangan suami istri harus saling menghargai dan menghormati, juga mendukung dan tolong-menolong satu sama lain dalam kebajikan. Seperti halnya yang terjadi apabila suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer), (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 126.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

Kota Depok merupakan kota penyangga ibu kota yang dinamika sosialnya tinggi, dengan adanya aturan terkait hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga di Kota Depok mampu membantu mengatasi permasalahan dinamika sosial baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan kemajuan teknologi. Karena sebuah institusi yang memiliki peranan pengaruh besar untuk menyelesaikan masalah sosial itu sendiri adalah keluarga. Keluarga yang hubungan orang tua atau suami istri berjalan dengan baik maka dapat dipastikan hubungan antara orangtua dan anak juga berjalan dengan baik. Dengan mengembalikan fungsi-fungsi keluarga, keluarga diharapkan mampu memanfaatkan potensinya agar dapat menghadapi tantangan hidup.

Sehubungan dengan itu, jika kita berbicara mengenai bonus demografi yang mana merupakan suatu kondisi dimana suatu wilayah atau Negara memiliki jumlah penduduk usia produktif (15-56 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif (0-15 tahun). Di Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020-2030. Hal ini seharusnya menjadi hal yang positif dan sangat berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu Negara apabila dipersiapkan dengan baik dengan cara pengoptimalan sumber daya manusia, namun yang dikhawatirkan adalah apabila sumber daya manusia tersebut tidak berkualitas, sehingga menjadikan pemerintah Kota Depok mengambil salah satu cara yaitu dengan mengokohkan ketahanan keluarga. Dengan adanya aturan tersebut, maka turut andil dalam menciptakan generasi yang matang secara mental, cerdas secara akal, tinggi spiritualnya, dan kreatif sehingga mereka mampu berkompetisi. Hal ini juga

Adanya peraturan ini memang berdampak baik bagi keluarga yang mana mengupayakan agar ketahanan keluarga menjadi kuat dan menekan angka perceraian yang terjadi di Kota Depok. Namun melihat kondisi yang sesungguhnya, suami dikategorikan dalam hal lalai atas kewajibannya sehingga menjadikan seorang istri memiliki peran ganda dengan memikul 2 (dua) beban yakni mencari nafkah serta mengurus anak dan rumah tangga. Posisi istri dalam hal ini disebut dengan istilah *double burden* (beban ganda), yang berarti beban kerja orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi juga bertanggung jawab atas sejumlah besar pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar. Fenomena ini tidak menutup kemungkinan istri kewalahan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam pun memuat pada pasalnya yakni Pasal 77 ayat (5) yang berbunyi “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Ulama pun berpendapat mengenai hal tersebut, pasalnya *double burden* bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sehingga mengenai nafkah yang tidak terpenuhi, menurut pendapat Hanafiyah nafkah tersebut menjadi hutang dengan ketetapan hakim dan nafkah tersebut wajib dibayar pada waktu mendatang jika mampu. Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jika suami tidak mampu memberikan nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah

Kembali lagi melihat dengan adanya kemaslahatan yang ditimbulkan dari adanya peraturan tersebut, mengingat perceraian merupakan jalan yang dibenci oleh Allah sehingga jika dikaitkan dengan syarat *mas{lah}ah mursalah* sebagai dasar pembentukan hukum, maka konsep tentang peningkatan ketahanan keluarga menyangkut hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga telah sesuai dengan syarat yang ada. Pertama, sesuatu yang dianggap *mas{lah}ah* haruslah yang benar-benar mendatangkan manfaat bukan hanya sekedar dugaan saja. Dan pada permasalahan ini istri sebagai kepala keluarga dapat membantu mengoptimalkan peranan keluarga agar tercapainya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 129.

[illegible]

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, peraturan daerah ini mendatangkan manfaat, seperti halnya pemenuhan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi meski terdapat perubahan fungsi di dalamnya, unsur-unsur yang menjadikan keluarga harmonis dapat berjalan dengan baik di kehidupan sehari-hari.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiel dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.¹⁰ Dapat dilihat bahwa dengan adanya suatu ketahanan keluarga mampu menjadi tameng dalam menghadapi permasalahan dinamika sosial, hal ini pun menjadikan keluarga terhindar dari rentan perceraian. Jadi, keluarga merupakan bagian dari rakyat yang menjadi unsur adanya suatu Negara. Sehingga jika rakyat memiliki ketahanan maka Negara pun menjadi kuat.

⁹Ibid., 8.

[illegible]

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa suami adalah kepala keluarga dan al-Qur'an, Sunnah, ataupun ijmak tidak mengatur tentang seorang istri sebagai kepala keluarga, hanya saja dengan adanya peraturan daerah ini mampu memelihara kelima hal yang harus ada dan dijaga oleh manusia, termasuk di dalamnya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Meskipun tidak diatur namun apabila tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam maka seorang istri yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga dengan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh kepala keluarga merupakan suatu bentuk kebolehan selama yang menjadi syarat dalam *mas}lah}ah mursalah* tetap terjaga.

Menurut tingkatannya, hal ini termasuk ke dalam *mas{lah}ah al-H}a>jiya>t* yang mana apabila *mas{lah}{ah* ini dihilangkan akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan rumah tangga yang dijalani, terutama akan berdampak pada anak yang menjadi korban dari kerusakan hubungan orang tua. Sehingga banyak sekali manfaat yang ditimbulkan dari adanya peraturan daerah tersebut, khususnya dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga dapat dikatakan sebagai inti atau pondasi dari sebuah keluarga itu sendiri, karena hubungan antara suami dan istri yang baik adalah langkah awal untuk mencapai tujuan dari sebuah pernikahan. Dengan membangun ikatan cinta dan memupuk rasa kasih sayang mampu menumbuhkan sikap-sikap yang mendukung

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah dikarenakan cacat fisik dan psikis yang tetap maka istri yang melaksanakan tugas sebagai kepala keluarga, hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pengoptimalan potensi diri dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dalam sebuah keluarga. Hal tersebut dijalankan dengan tetap berpegang teguh pada kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai istri dari suami dan juga sebagai ibu rumah tangga pendidik anak-anaknya. Hal ini dilakukan semata-mata demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
2. Adapun di dalam hukum Islam, tidak ada *nas* atau dalil-dalil yang secara khusus melarang istri untuk bekerja apalagi jika bekerjanya istri dikarenakan suatu keadaan tertentu yang menjadikan ia menggantikan tugas kepala keluarga sebagai pencari nafkah. Istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga memang tidak sesuai dengan kaidah dasar yang ada, karena mencari nafkah merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Namun hal ini tidak juga bertentangan

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam penelitian ini, maka terdapat saran yang penulis sampaikan sebagaimana berikut:

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arifin, Miftahul dan A. Faishol Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe”, *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (Juni, 2018), 78.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. ke-4, Ed. ke- 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan As’ari, “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)”, (Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau: 2012).
- Ibanatul Waro, “Istri menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi—STAIN Purwokerto, Purwokerto: 2009).
- Jamaluddin, Arif. *Hadis Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Taufik Hidayat Sahkar, "Kedudukan Istri sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Berkeluarga di Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto)", (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, Makassar: 2017).
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Umar, Muhksin Nyak. *Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.